

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini membahas tentang globalisasi dan era informasi yang membawa tren transformasi digital dalam memunculkan keberlangsungan kegiatan ekonomi digital di kawasan ASEAN (Association of Southeast Asia Nations). OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) menyebutkan bahwa tren transformasi digital ini menjadi pemicu pertumbuhan inovasi dan produktivitas di banyak kegiatan, diantaranya efisiensi layanan publik dan meningkatnya kesejahteraan melalui informasi, pengetahuan, dan data (OECD, 2017). Laman daring PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) menyebut tren ini sebagai bagian dari tiga global *mega-trend* yang mendapat perhatian besar dari masyarakat dunia dari dua lainnya yaitu tren masifnya pergantian dan perubahan tenaga kerja manusia ke mesin (robot) dan tren perubahan iklim (*climate change*) yang gencar dikampanyekan oleh banyak elemen masyarakat di dunia (United Nations, 2017).

Melihat berbagai tren ini, Sekretaris Jenderal dari Departemen Ekonomi dan Sosial PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Liu Zhenmin secara khusus menyoroti tren transformasi digital yang dibarengi pesatnya kemajuan teknologi-informasi dan dipercaya dapat menjembatani kompetisi kemajuan, khususnya ekonomi antar negara (United Nations, 2017). Apabila merujuk tesis Frank Webster dalam *Theories of Information Society*, tren ini memiliki relasi dengan fenomena ‘teknologi baru’ bernama internet. Ia menyebutkan teknologi ‘baru’ menjadi indikator paling dominan dari perubahan zaman (Webster, 1995). Hal ini terbukti ketika peranan internet sebagai bagian teknologi-informasi semakin terkodifikasi dalam tatanan ekonomi global. Selain itu, internet juga menjadi aktor utama yang memengaruhi tren transformasi digital utamanya pada keberlangsungan ekonomi digital.

Konsep atau fenomena ekonomi digital ini secara sederhana dapat dipahami melalui kompetisi ekonomi di kawasan seperti Amerika, Eropa dan Asia, utamanya dalam

Forum, 2018). Menurut uraian penelitian Google dan Temasek (2018) di Asia Tenggara hanya dengan wilayahnya seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam sudah menyumbang 350 juta pengguna internet di kawasan pada 2018. Angka ini naik 90 juta dari tahun 2015 yakni dengan kisaran 260 juta pengguna. Dari sumber lain, menurut media asal Singapura, *Straitstimes*; prosentasenya menyentuh angka 80% bahwa masyarakat ASEAN telah terkoneksi dengan internet (Das, 2018).

Riset dari We Are Social dan Hootsuite's (Kemp, dalam Techinasia, 2017) sejak 2016 juga menunjukkan hasil hampir sama, khususnya dari indikator statistik di kawasan ASEAN yang meningkat menjadi 31% atau sekitar 80 Juta *user* baru jiwa per tahunnya. Mereka menyebut kawasan ini potensial karena sedang melakukan lompatan pertumbuhan melalui transformasi teknologi dengan meningkatkan pengguna internet. Angka pertumbuhan dan peningkatan pengguna internet secara spesifik juga dipengaruhi dari pengguna aktif "sosial media" yang mencapai 31% dan artinya ada 72-80 juta pengguna baru setiap tahunnya. Karenanya, internet di kawasan ini tidak sebatas berfungsi untuk mengakses informasi, terlebih sudah terkomodifikasi dalam sektor ekonomi. Maka, untuk terus meningkatkan angka penetrasi penggunaan internet tiap harinya, mayoritas pengguna internet menggunakan telfon genggamnya sebagai 'stimulan' untuk membangun industri baru berbasis internet yang kemudian menjadi model bisnis baru bernamakan ekonomi internet (*internet economy*) atau juga ekonomi digital (Mahmood, 2018).

Direktur eksekutif Sea Ltd, Forest Li mengungkapkan besarnya peluang aktivitas ekonomi digital yang ada di beberapa negara ASEAN. Li mengaku ingin memanfaatkan momentum potensi ini, khususnya dari sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di kawasan untuk masuk dalam barisan *e-commerce*¹ agar lebih efisien dan cepat beradaptasi dalam pasar digital (Leow, 2018). Presiden Mindsphere World ASEAN-Pacific, Narsingh Chaudary juga memiliki proyeksi tersendiri terhadap kawasan ASEAN. Menurutnya, selain dipenuhi dengan

¹ Electronic Commerce (*E Commerce*) atau perdagangan elektronik diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui internet (Mariana, 2012 dalam Unpas, 2012)

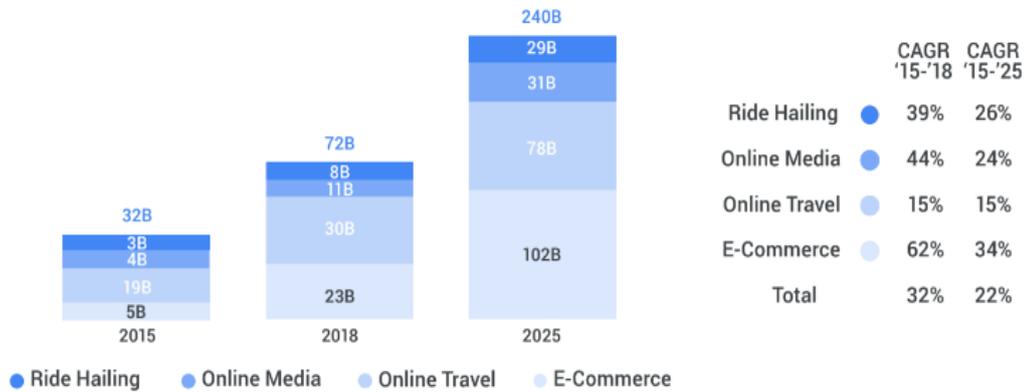
perkembangan industri manufaktur, kawasan ini akan meningkat drastis dengan keberadaan sektor industri berbasis IoT (*Internet of Things*)². Chaudary menyadari betul bahwa keberadaan IoT dalam industri di ASEAN akan berpotensi untuk mengangkat transformasi teknologi-informasi dan pertumbuhan ekonomi digital yang bisa mencapai angka US\$ 200-an Miliar pada 2025 (Straitstimes, 2019).

Tingginya pertumbuhan populasi pengguna internet di ASEAN juga menjadi bukti tren transformasi digital di kawasan sebagai *hot spot* baru pengembangan digitalisasi kawasan. ASEAN dengan potensinya juga berhasil memprakarsai penggunaan sosial media dan internet dalam jumlah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Kwakwa, 2018). Menurut *Google Report* transformasi digital di kawasan ini mendorong kemunculan *online retail (e-commerce)*, transportasi online (*ride hailing*), serta *e payments apps* yang membantu masyarakat dalam kegiatan ekonomi, kesehatan, pendidikan, travel hingga hiburan. Secara individu, keuntungan juga didapati oleh negara-negara dari kegiatan ekonomi digital atau *internet economy* ini seperti Indonesia sebagai negara dengan angka pertumbuhan tercepat dalam urusan digitalisasi dan perolehan terbesar di kawasan yakni pada US\$ 27 juta. Disusul Thailand (US\$ 12 juta), Vietnam (US\$ 9 juta), Malaysia (US\$ 8 juta) dan Filipina (US\$ 5 juta) (Google Temasek, 2018). Keuntungan lainnya juga muncul dimana ASEAN menjadi kawasan subur bagi pertumbuhan ekonomi digital dengan tujuh '*unicorn*'³ seperti GoJek, Grab, Lazada, Razer, Sea Ltd (Garena/ Shopee), Traveloka, dan Tokopedia (Google & Temasek, 2017). Dalam hal ini, adanya transformasi digital juga telah mengubah paradigma pada pelaku pasar di kawasan untuk memiliki fokus produktivitas pada kegiatan ekspor. Hal ini selain meningkatkan sisi produktivitas juga mendorong ekspansi produk dalam keterbukaan ekonomi regional maupun global dengan kemudahan *cross broder transaction* yang sudah terdigitalisasi seperti yang ditunjukkan dalam sektor ekonomi digital (OECD, 2017)

² Skenario dan struktur perpindahan data tanpa menggunakan perantara manusia ke manusia, melainkan menggunakan jaringan digital (Burange & Misalkar, 2015).

³ Perusahaan berbasis teknologi-informasi yang memiliki nilai valuasi lebih dari US\$1 milyar

Grafik 1.1 : Pertumbuhan dan Jenis Market Ekonomi Digital di ASEAN



Sumber: Russel (2018, dalam techcrunch, 2018)

Dari grafik (1.1) juga dapat diambil sebuah narasi bahwa perkembangan ‘*internet economy*’ di ASEAN bergerak sangat pesat. Google dalam laporannya menyebutkan estimasi dan proyeksi capaian angka di ASEAN terbilang cukup besar dengan kisaran US\$ 240 milyar untuk tahun 2025. Angka tersebut diisi dan didominasi oleh *e-commerce*, media online, layanan jasa angkutan atau transportasi, hiburan dan travel (Russel, 2018). Dominasi *e-commerce* menjadi potensi di kawasan dengan akselerasi pasarnya yang cukup besar melalui platform *mobile first* atau ponsel yang terkoneksi dengan internet. Dengan menjadikan semua orang bisa membeli dan menjual apa saja hanya melalui ponsel genggamnya masing-masing. Belum lagi, platform seperti Lazada, Tokopedia, dan Shopee (Sea Group Ltd) menggunakan sistematisasi dimana UMKM atau usaha ritel kecil bisa menjangkau konsumen baik di dalam maupun luar negeri (Google & Temasek, 2017). Kaitanya dengan kegiatan ekonomi digital, UMKM di Asia Tenggara memang terbilang memiliki urgensi yang tidak kalah penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Senada, OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) juga menunjukkan angka bahwa hampir 87%-99% model usaha bisnis di kawasan ini masuk dalam kategori UMKM. Di kawasan ini keberadaan UMKM juga berhasil menyerap tenaga kerja hampir 97% dari populasi. Sehingga wajar saja

apabila peningkatan CAGR sektor *E commerce* di ASEAN terlihat lebih besar ketimbang sektor lainnya (OECD, 2019) .

Lain halnya dengan Sektor *Ride Hailing* atau jasa layanan transportasi online yang diisi oleh Grab, Uber dan GoJek. Ketiganya adalah pemain besar yang menghasilkan lebih dari US\$ 5.1 milyar GMV (*Gross Merchandise Volume*)⁴ pada tahun 2017 dan menguasai 200 kota lebih di wilayah ASEAN pada bidang transportasi. Layanan transportasi online terbukti berdampak signifikan dalam perkembangan ekonomi digital. Sektor ini berhasil mempekerjakan 2.5 juta orang pekerja di kawasan tiap tahun. Tak sekedar mengubah kendaraan pribadi sebagai transportasi umum. Sektor *ride hailing* juga berpelembangan pada layanan fitur pesan dan pengantaran makanan (GrabFood, UberEATS dan Go-Food), jasa kurir (Go-Send dan Grab Express), pembayaran (Go-Pay, GrabPay dan OVO), hingga layanan kesehatan (Google & Temasek, 2017). Ditambah lagi dengan sektor online *travel booking* yang menyumbang lebih dari US\$ 30 juta pada 2018 dan sektor *online media, gaming, music* dan *video on demand* yang meraup US\$ 11 juta dari sektor ekonomi digital pada 2018 (Google Temasek, 2018).

Dalam urusan investasi, mengutip *e-Conomy SEA Spotlight 2017 Unprecedented growth for Southeast Asia's \$50B Internet Economy*, angka investasi pada sektor ekonomi digital di ASEAN sudah mencapai US\$ 12 milyar sejak tahun 2016. Investasi modal ventura (usaha) tersebut merupakan jaminan sekaligus suara kepercayaan dari investor regional dan global terhadap perkembangan ekonomi digital di ASEAN yang cukup meyakinkan. Penanaman modal usaha tersebut sekaligus menyejajarkan kawasan ASEAN dengan India (0.18%), memperkecil ketertinggalan dari Tiongkok (0.30%) serta mengejar Amerika Serikat (0.40%) dalam urusan perolehan investasi pada industri ekonomi digital dan akan terus bertambah seiring dengan masifnya tren transformasi digital pada sektor ekonomi (Google & Temasek, 2017).

⁴ Istilah yang digunakan untuk menunjukkan jumlah penghasilan atau uang yang diterima pada perusahaan *Start Up* (dalam, Katadata, 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Pengaruh tren transformasi digital tidak hanya memunculkan potensi ekonomi digital di ASEAN, akan tetapi juga tantangan yang menghambat keberlangsungan ekonomi digital. Lantas, apa bentuk tantangan yang menghambat dan dihadapi beberapa negara anggota ASEAN dalam keberlangsungan ekonomi digitalnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum yakni untuk mengetahui keberlangsungan dan tantangan ekonomi digital di ASEAN. Penulis dalam hal ini membaginya pada beberapa poin bahasan yang diantaranya; (1) Bentuk tantangan ekonomi digital yang dihadapi negara-negara di kawasan ASEAN (2) Langkah dari ASEAN dan beberapa negara anggotanya dalam memanfaatkan tren transformasi digital dan mengelola ekonomi digitalnya.

1.4 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini, penulis meninjau beberapa literatur untuk membandingkan data maupun pernyataan mengenai tren transformasi digital pada teknologi-informasi dan keberlangsungan ekonomi digital di ASEAN. Literatur pertama yaitu dari M.A. Afonsova, E.E. Panfilova, dan M.A. Galichkina (2018) dari tulisan berjudul *Social and Economic Background of Digital Economy: Conditions for Transition* yang diterbitkan Jurnal European Research Studies. Dari tulisan tersebut, ekonomi digital atau digitalisasi pada sektor ekonomi dianggap sebagai kunci dari tumbuhnya inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan tatanan sosial di masyarakat (Afonsova et al., 2018). Afonsova memberikan pandangan bahwa lahirnya transformasi teknologi-informasi beserta ekonomi digital adalah *tools* yang tidak hanya ikut menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi juga ikut mengubah kebiasaan ekonomi tradisional dan relevansi pentingnya letak geografis. Alasan lain yang melatarbelakangi gagasan ini juga melihat peluang bahwa dalam kegiatan ekonomi digital memiliki keunggulan bagi mereka yang menguasai *network* (jaringan) dan *big data* atau juga informasi (Afonsova et al., 2018). Tesis Afonsova ini dikembangkan dari Valenduc dan Vendramin (2016) tentang luasnya

jaringan dan manfaatnya bagi fungsi konektivitas antar perusahaan serta keterbukaan peluang pasar.

Penguasaan jaringan dan *big data* juga tidak lepas dari kemampuan suatu aktor, baik itu negara atau pjun non negara yang sukses dalam melakukan transformasi digital di wilayahnya. Literatur lain yang mendukung gagasan ini yakni datang dari Banning, M.E (2016) berjudul *Shared Entanglements – Web 2.0, Info-Liberalism & Digital Sharing Information, Communication and Society*. Dalam literatur kedua ini, Banning menunjukkan bahwa adanya ekonomi digital dipengaruhi oleh modernisasi informasi dan pembangunan infrastruktur pada sektor informasi, komunikasi dan teknologi (*Information, Communcication and Technology - ICT*). Pembangunan ini berhasil mentransformasikan fungsi ICT sebagai alat untuk kegiatan ekonomi. Jika terus dikelola dan ditingkatkan performanya, keberadaan fasilitas ICT juga dapat ikut berkontribusi terhadap tumbuhnya sektor jasa serta menarik investasi asing yang berkontribusi pada kekuatan ekonomi. Banning menyebutkan dorongan ICT seperti IoT (*Internet of Things*) dan ketersediaan *Big Data* merupakan potensi dari terfasilitasinya kegiatan ekonomi digital (Banning, 2016).

Kaitanya dengan fasilitas dan kemampuan pengelolaan ICT sebagai prasyarat digitalisasi ekonomi, penulis meneruskanya dalam literatur ketiga yang diambil dari tulisan Kenechi Okeleke, Henry James dan Yoone Jeong dari GSMA Intelligence dan sebuah lembaga riset telekomunikasi bernama TRPC. Okeleke membagi dan memetakan kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara dengan adanya ASEAN dalam beberapa lanskap berdasarkan kemampuan digitalnya (Okeleke, et al 2016). Menurutny, lanskap yang dituliskan disini memberikan berpengaruh terhadap lahirnya masyarakat informasi dan respon tiap-tiap negara dalam mengelola potensi digitalnya dan tantangan yang dihadapi khususnya untuk mengembangkan ekonomi digital.

Kategori lanskap pertama, *Emerging Digital Societies* memiliki ciri khas berupa kondisi negara-negara yang melihat digitalisasi sebagai alat untuk percepatan pembangunan sosial-ekonomi, utamanya untuk meningkatkan inklusi sosial.

Penghuni dari kategori ini yaitu negara Laos, Myanmar, Kamboja dan Vietnam (Okeleke, et al 2016). Sedangkan dari lanskap kedua yaitu *Transitions Digital Societies* diisi oleh Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina yang melihat transisi pada masyarakat untuk meningkatkan kebutuhan personalisasi layanan antara individu dan lembaga. Dalam lanskap ini, pemanfaatan digitalisasi sebagai *tools* untuk mendapatkan profit ekonomi sudah mulai tertata dengan baik. Kategori lanskap ketiga yaitu *Advanced Digital Societies* dihuni negara Singapura dan Brunei Darussalam. Pada lanskap ini, baik masyarakat, perusahaan dan instansi pemerintahan sudah terkoneksi dan terdigitalisasi dengan baik. Jaringan yang ada pun ikut meningkatkan pertumbuhan dan produktifitas ekonomi. Efisiensi sudah berjalan dengan baik seiring kemampuan olah digital yang saling terkoneksi dengan berbagai sektor, utamanya pada sektor *service* (jasa) dan ekonomi informasi atau *digital economy* (Okeleke et al., 2016).

Dari tiga lanskap di atas menunjukkan bagaimana transformasi digital dilihat sebagai potensi untuk membangun dan mengembangkan digitalisasi pada sektor ekonomi. Untuk melihat lebih detail potensi apa saja yang bisa dijadikan alat untuk membangun dan mengembangkan ekonomi digital dapat ditinjau dalam literatur keempat dari seorang Presiden Cisco system di ASEAN yakni Naveen Menon (2019) yang menurut dirinya bahwa tingginya jumlah pengguna dan penetrasi penggunaan internet adalah bagian dari potensi tumbuhnya ekonomi digital. Menon (2016) memperlihatkan data dari kawasan ASEAN dimana terdapat 90% dari 600 juta lebih populasinya telah terkoneksi dengan internet. Kemudian, 50% populasi di kawasan ini sedang berusia pada ambang di bawah 30 tahunan yang artinya berada dalam skala produktif. Kawasan ini juga didukung dengan angka melek huruf dari populasi yang mendekati 100%, yaitu pada ambang 94%. Bisa dikatakan, dari potensi tersebut kawasan ASEAN juga memiliki potensi yang strategis untuk ikut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital – baik itu menggunakan internet untuk belanja, akses perbankan, layanan transportasi atau bahkan memesan hotel dan tiket hiburan (Menon, 2016).

Besarnya potensi yang hadir pada era digital, masih minim dukungan terutama pada infrastruktur dan edukasi pada masyarakat. Sehingga muncul ketidaksiapan dalam mentransformasikan keberadaan teknologi informasinya. Hal inilah mengapa kemudian bahwa terjadinya tren transformasi digital dan ekonomi digital tidaklah terlepas dari adanya disrupsi digital. Istilah ini kini gencar dibahas karena dapat menjelaskan aktor baru yang ikut berkompetisi dengan aktor lama, hingga inovasi bisnis yang mengandalkan efisiensi dan *branding* yang kemudian membuka pasar baru serta menghasilkan proses produksi yang murah. Istilah ini dijelaskan secara spesifik oleh Daniel A. Skog, Henrik Wimelius, Johan Sandberg dalam jurnal internasional *The International Journal of Wirtschafts Informatik*, Department of Informatics, Umeå University, Swedia.

Skog et al (2018) menyebutkan terdapat tiga elemen kunci dalam adanya disrupsi digital yakni inovasi digital, ekosistem digital dan logika nilai. Dirinya mengatakan bahwa inovasi menjadi elemen penting dalam terjadinya disrupsi digital untuk memulai proses perubahan yang lebih besar, yaitu transformasi digital dan adanya ekonomi digital. Transformasi digital memicu berbagai inovasi digital, beberapa di antaranya dapat menghasilkan 'kejutan' sistemik, yaitu disrupsi digital yang mengubah banyak hal dalam berbagai kegiatan manusia. Kaitanya dengan suatu bisnis dan industri, adanya Uber, Spotify, AirBnb menjadi salah satu contoh bagaimana layanan *ride hailing*, musik dan penginapan mulai mengancam keberadaan dan pasar dari para aktor lama, dalam hal ini taksi konvensional, para penjual kaset musik, dan penyediaan layanan hotel (Skog et al, 2018).

Adanya disrupsi digital ini harus disiapkan oleh pihak-pihak yang memegang kewenangan dengan kebijakan. Belum sinkronnya regulasi yang mengatur integrasi ekonomi digital di kawasan ASEAN juga disebutkan oleh Yasmin Yahya dari *stratitstimes* sebagai akibat tren transformasi digital yang belum merata. Menyadur kutipan pidato dari Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Long- Yahyaewartakan keseriusan PM Lee yang siap mendorong terciptanya integrasi ekonomi. PM Lee akan ikut berkontribusi pada adanya sinkronisasi dan

harmonisasi sistem pada revolusi digital untuk menghantarkan *cross border transactions* yang efektif dan terciptanya integrasi ekonomi (Yahya, 2018).

Karenanya, penulis berpandangan dan memosisikan dirinya pada pendapat bahwa setiap kawasan dan negara memiliki respon yang sama terhadap potensi digital di wilayahnya, yakni mendapatkan manfaat maksimal dari digitalisasi. Akan tetapi, kondisi dan situasi domestik tiap negara, khususnya di ASEAN menunjukkan adanya *gap* terhadap kesiapan dan kemampuan untuk ikut dalam mentransformasikan potensi digitalnya dalam keberlangsungan sektor ekonomi digital. Jadi, dalam hal ini penulis melihat bahwa terdapat beberapa tantangan yang menghambat progres dan keberlangsungan digitalisasi ekonomi di kawasan ASEAN.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini, kerangka berfikir yang tersusun di bawah adalah jembatan dari fenomena kajian globalisasi dan hubungan internasional di kawasan melalui adanya tren transformasi digital beserta pengaruhnya pada hadirnya tantangan dan keberlangsungan ekonomi digital di kawasan ASEAN;

1.5.1 Ekonomi Digital & Economic Development

Konsep ekonomi digital (*digital economy*) atau juga dikenal dengan *New Economy*, *Internet Economy* dan *Information Economy* adalah konsep pengembangan sektor ekonomi yang mulai dikenal pasca abad 20 an. Istilah ekonomi digital mulai banyak dikenal seiring dengan pesatnya transformasi teknologi-komunikasi dan munculnya masyarakat informasi⁵ yang menjadi penghantar efisiensi dan produktifitas kegiatan ekonomi. Selain itu, ekonomi digital juga dikenal mempromosikan *cross border transaction* secara global melalui *platform* yang berasal dari transformasi digital yang berangkat dari ide, inovasi dan adopsi teknologi-informasi (Yahya, 2018). Dalam konsep ini, keberadaan teknologi-informasi dan khususnya internet di masyarakat bisa digunakan untuk mendapatkan apapun yang diinginkan tanpa

⁵ Ketika informasi digunakan sebagai inti dari kebutuhan ekonomi masyarakat (Masuda, 1990:66 dalam, Low, 1996).

harus pergi ke luar negeri ataupun mengurus dokumen-dokumen pembelian (G20 China, 2016).

Ekonomi digital juga dipahami sebagai *key driver* sekaligus *tools* baru dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, kawasan maupun global. Argumen tersebut berangkat dari adanya otomasi dan digitalisasi mendukung operasi produksi yang lebih cepat, efisien dan menghemat banyak pengeluaran dalam berbagai hal, khususnya kontrol distribusi (Lydia, 2019). Tesis ini menjadi indikator dari suksesnya transformasi digital teknologi informasi yang terjadi di tengah masyarakat, baik itu individu, perusahaan maupun pemerintahan. Dalam pertemuan negara-negara G20 di Tiongkok pada 2016, konsep ekonomi digital menjadi perhatian utama sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan (*growth*) ataupun pembangunan (*development*) ekonomi secara global. Ekonomi digital juga dianggap dapat mengakselerasikan inklusivitas dan ekonomi berkelanjutan (*sustainable*) pada semua lini sektor (G20 China, 2016).

1.5.2 Konektivitas dan Percepatan Pembangunan Ekonomi

Dalam konsep ekonomi digital adanya konektivitas sangat dibutuhkan untuk memulai dan melakukan percepatan pembangunan ekonomi. Konektivitas sendiri memiliki multi-definisi yang artinya akan didapat apabila memberikan makna sesuai pada objek yang dikaitkan dalam upaya pembangunan (*development*). GICA (Global Infrastructure Connectivity Alliance) mengartikan konektivitas sebagai *sine qua non*⁶ dalam abad 21 ini, khususnya dalam aspek ekonomi modern. GICA menyebutkannya seiring dengan terjadinya peningkatan permintaan terhadap sumber daya alam dan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehingga dibutuhkan sesuatu untuk menghubungkan antara masyarakat, ekonomi dan negara secara menyeluruh (GICA, 2018:3).

Faktor konektivitas menjadi begitu penting karena ikut menyelaraskan tingkat pembangunan ekonomi yang berfokus pada tiga domain penting yang diantaranya pada domain pembangunan fisik, informasi dan aliran keuangan (GICA, 2018).

⁶ Sesuatu yang tidak terelakan (GICA, 2018:3)

Presiden China Institute of International Studies, Mr. Qu Xing (dalam UN ESCAP, 2014) juga menyebutkan bahwa konektivitas adalah level efektifitas dari suatu jaringan di kawasan untuk memfasilitasi arus pertukaran barang, pelayanan, mobilitas masyarakat, dan transfer pengetahuan (*knowledge transfer*). Menurutnya, selain sebagai alat untuk mempercepat pembangunan ekonomi, konektivitas akan mendukung adanya integrasi pada fasilitas fisik dan nonfisik guna menjadi sebuah parameter dalam menawarkan efisiensi pada harga dan waktu dalam suatu integrasi pembangunan (UN ESCAP, 2014). Selain itu, konektivitas juga berperan penting menghubungkan transportasi antar negara, efisiensi perdagangan, peningkatan infrastruktur ICT, dan akses yang ramah terhadap mobilitas masyarakat (Vineles, 2017).

Dalam upaya konektivitas juga terdapat peranan pengembangan kolektifitas jaringan (*bundel of network*) yang diikutsertakan untuk mengelola dan mempercepat pembangunan. Ide ini berangkat dari logika konektivitas yang menghubungkan jaringan pada pusat kota dengan industri, kemudian antara wilayah pesisir dengan pedalaman, serta dengan keberadaan rute lintas batas (UN ESCAP, 2014). Sebagai contoh, konsep konektivitas pada jaringan di kawasan memiliki arti strategis apabila terakomodasi dan terintegrasi dengan baik. Keberadaannya dapat meningkatkan manfaat persebaran konektivitas itu sendiri dalam upaya pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan, khususnya bagi negara-negara berkembang dan negara kurang beruntung, seperti negara-negara yang terkurung dengan daratan (*landlock*) seperti Laos ataupun ditengah pulau-pulau kecil di Samudera Pasifik (Xing, dalam UN ESCAP, 2014). Kolektifitas jaringan ini sesuai dengan isi strategi dalam Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 yang diantaranya mencakup mencakup tiga dimensi berikut: konektivitas fisik (transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, energi); kelembagaan (perdagangan, investasi, liberalisasi jasa); dan hubungan antar manusia (pendidikan, budaya, pariwisata) (MPAC, 2010)

OECD dalam dokumen berjudul *Southeast Asia Going Digital: Connecting SMEs* (2019) memberikan pengertian dari istilah konektivitas sebagai instrumen utama

dalam meningkatkan peluang berkembangnya individu, golongan, perusahaan swasta ataupun sektor publik. Dalam dokumen tersebut juga tercatat salah satu bentuk peluang lain yang muncul yakni berupa transformasi digital (OECD, 2019:23).

“Connectivity is a critical building block of the digital economy - A fundamental challenge for Southeast Asia today and in the future is connectivity. Connectivity is an essential element for enabling digital transformations and, in this function, is a building block for digital economies (OECD, 2019:14).”

Transformasi digital adalah salah satu bagian tidak terpisahkan dari upaya konektivitas di kawasan. Dalam hal ini, suatu proses transformasi digital termasuk dalam upaya konektivitas digital di negara ataupun kawasan yang memiliki program kerja dalam availabilitas ketersediaan informasi terhadap proses digitalisasi sektor ekonomi. Kaitanya dengan digitalisasi ekonomi, peranan konektivitas mendorong kerjasama dari keterlibatan banyak pihak untuk meningkatkan pertumbuhan produksi domestik dan agregat ekonomi regional melalui sektor ekonomi digital (UN ESCAP, 2019). Selain itu, adanya konektivitas digital juga ikut meningkatkan percepatan pembangunan dalam serapan terhadap kualitas sumber daya manusia yang berkompetensi dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi.

1.5.3 Sumber Daya Manusia dan *Digital Skills*

Perhatian terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan *Digital Skills* (kemampuan digital) adalah hal yang tak kalah penting dari konektivitas. Era globalisasi yang diiringi dengan transformasi digital menuntut adanya kualitas SDM yang memiliki kemampuan olah digital (*digital skills*) agar ikut memberikan pengaruh terhadap adanya pembangunan ekonomi (*economic development*). Sayangnya, hal ini tidak akan mudah dilakukan di negara-negara miskin yang tidak memiliki sumber daya manusia yang terlatih (*skilled labor*) dan terdidik (*educated*). Merujuk argumen Wei-Hsein Yang dalam tulisannya “*Human Resource as The Key Factor of Economic Development*” bahwa kurangnya tenaga kerja terampil dapat

menghambat pertumbuhan dan ekspansi ekonomi. Begitupun dengan rendahnya kualitas SDM yang terdidik sebagai pekerja (ilmuwan) akan ikut memengaruhi kontribusi terhadap pekerja terlatih yang profesional dalam pengelolaan teknologi (Yang, 1967).

Argumen di atas menjadi bukti bahwa aspek SDM secara kuantitas dan kualitas berperan penting dalam kegiatan ekonomi (Yang, 1967). Pentingnya ketersediaan SDM yang berkompotensi disebutkan dalam sebuah laporan dari Dewan Tenaga Kerja Nasional Amerika Serikat (National Manpower Council of United States) bahwa kekuatan sebuah bangsa bergantung pada kualitas daripada sekedar kuantitas (jumlah) SDM nya. Badan Tenaga Kerja AS menilai jika potensi dari kapasitas masyarakatnya adalah sumber daya paling berharga. Mereka percaya bahwa dari bidang usaha apapun akan mendapat manfaat sepenuhnya apabila memberikan peluang yang lebih besar dalam memberikan pelatihan dan pengembangan bakat kepemimpinan pada tenaga kerjanya (Yang, 1967).

Ekonom seperti Adam Smith juga menegaskan pentingnya SDM sebagai faktor kunci (*key factor*) dari sebuah kapasitas meningkatkan produktifitas masyarakat. Menurut Smith (dalam Yang, 1967:2);

“whatever be the soil, or extent of territory of any particular nation, the abundance or scantiness of its annual supply, must~ in that particular situation depend on two circumstances” -- the proportion of its people engaged in useful occupations and skill” (Yang, 1967:2).

apapun yang menjadi kekayaan dari suatu negara, pada masanya akan bergantung dari dua kebutuhan utama yakni dari proporsi penduduk yang terlibat dalam pekerjaan dan mereka yang berketerampilan untuk hal yang bermanfaat (Yang, 1967:2). Adam Smith dari jauh-jauh hari sudah meyakini bahwa peran SDM memegang peranan penting dalam sebuah pola interaksi ekonomi kedepannya. Dirinya juga lantang bahwa sumber daya manusia adalah aspek fundamental bagi

pembangunan ekonomi serta berfungsi sebagai tujuan dan sarana dalam semua kegiatan ekonomi (Smith dalam, Yang 1967:12).

Argumen Smith pun terbukti nyata seiring dengan masifnya transformasi digital yang membawa kemajuan teknologi-informasi dalam kegiatan ekonomi. Dalam *Theories of Information Society* dijelaskan mengenai adanya pergantian dari “pekerja manual” menjadi “pekerja kerah putih” (*white collar*) atau mereka yang terdidik (*educated*) dan semi profesional. Hal ini oleh Franks Webster (1995) disebutkan sebagai kebutuhan produksi pada kebutuhan industri era kini yang lebih membutuhkan mereka tenaga kerja non-manual yang terampil dalam mengelola mengelola data-informasi (*data-information*) dan teknologi. Penulis pun mengindikasikan bahwa tidak memungkiri bahwa *digital skills* bagi SDM akan sangat penting. Karena konteks pembangunan ekonomi digital, adanya transformasi teknologi digital di sebuah kawasan juga akan secara otomatis mentransformasikan semua kegiatan pada sektor ekonomi. Jika demikian adanya, SDM ataupun tenaga kerja wajib mengikuti pelatihan untuk memiliki kemampuan olah digital agar bisa mengimbangi tuntutan pasar. Bagaimanapun, transformasi digital pada sektor ekonomi akan memberikan ruang baru dan menghasilkan pertumbuhan pada pembangunan ekonomi melalui pelatihan kompetensi *digital skills* pada SDM (The World Bank, 2019).

1.5.4 Kebijakan Kawasan (*Regional Policy*)

Kebijakan kawasan (*regional policy*) adalah salah satu bentuk implementasi untuk mendukung kegiatan ekonomi digital di kawasan. Kebijakan kawasan disini memiliki fungsi untuk menegaskan tindakan dan melindungi segala perilaku berdasarkan hukum dalam melakukan pembangunan ekonomi, seperti upaya konektivitas maupun peningkatan kompetensi *digital skills* pada SDM. Dari sudut pandang pembentukan dan eksistensi Uni Eropa, kebijakan kawasan dipahami sebagai sebuah nilai investasi strategis untuk meningkatkan kualitas hidup dan melindungi semua wilayahnya dari keikutsertaan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (European Commission, 2014). Konsep ini kemudian oleh Komisi Eropa (2014) dianggap sebagai sebuah “ungkapan”

solidaritas untuk memfokuskan dukungan ke wilayah ataupun kawasan lain yang kurang berkembang (European Commission, 2014 dalam Alexiadis, 2018). Argumen ini sekaligus menunjukkan interpretasi bahwa kebijakan kawasan memang sangat kental dengan perspektif ekonomi yang memudahkan adanya kegiatan pembangunan, baik itu secara fisik maupun non fisik seperti pada kebutuhan kualitas SDM. Komisi Eropa dalam juga tidak sungkan menyebut konsep kebijakan kawasan sebagai sebuah “kebijakan investasi” yang mendukung terbukanya tenaga kerja, daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas pembangunan hidup berkelanjutan (European Commission, 2014).

Merujuk penjelasan dari European Commission (EC) tujuan dari dibentuknya kebijakan kawasan tidak lain untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial dan teritorial. Lantas apabila terdapat suatu wilayah dalam satu kawasan yang tertinggal, maka akan merusak landasan terbentuknya kebijakan dan ikut mengganggu keberadaan pasar tunggal (*single market*) dan nilai mata uang (European Commission, 2014). Tujuan lain dari konsep kebijakan kawasan ini juga sebagai kendaraan untuk meningkatkan distribusi di kawasan (Alexiadis, 2018). Hal ini mengingat alasan terbentuknya kebijakan kawasan diantaranya dimotivasi oleh kepentingan aspek politik dan ambisi ekspansi pembangunan ekonomi-politik (Digitális Tankönyvtár, t.t)

Faktor lain yang menarik dari konsep kebijakan kawasan (*regional policy*) juga memfokuskan pada pencegahan masalah ketertinggalan di suatu wilayah yang belum makmur (Market Business News, t.t). Meskipun demikian, adanya kebijakan kawasan bukan satu-satunya faktor yang memutuskan sebuah pembangunan di kawasan. Dari segi pembangunan ekonomi sendiri, variabel lain yang ikut menentukan yakni seperti dari faktor lokasi apakah intra atau interregional, kriteria input dan output, sosiokultural dan lingkungan fisik, dan pasokan untuk faktor produksi. Semua faktor di atas merupakan bagian dari masalah utama dalam mengukur dampak dalam konsep kebijakan kawasan. Akan tetapi, bagaimana suatu kebijakan kawasan itu berdampak dilihat dari keterhubungan perubahan dalam

profil kawasan dengan kebijakan, atau dengan perkembangan otonom yang ada (Folmer, 1980: 1192).

Pada praktiknya, konsep kebijakan kawasan juga tidak lepas dari berbagai regulasi yang menjaga eksistensi perkumpulan negara anggota di dalamnya. Adanya kebijakan kawasan disini hadir dan dibentuk untuk saling menjaga keharmonisan dan menggalakan percepatan pembangunan aspek ekonomi, sosial, keamanan, hingga budaya. Menurut Bank Dunia, hadirnya transformasi digital ditambah dengan munculnya masyarakat informasi menuntut revitalisasi dari kebijakan kawasan. Utamanya untuk mengakselerasikan pembangunan dari adanya transformasi digital di berbagai sektor. Adanya revitalisasi kebijakan kawasan yang menyesuaikan era globalisasi ini juga membantu mengatasi resiko dan mengatur prioritas standar yang efektif dalam keberlangsungan transaksi elektronik, aliran data lintas batas (*data flow*), keamanan siber, privasi data, dan perlindungan konsumen dalam sektor ekonomi digital. Kebijakan kawasan juga dianggap sebagai langkah solid untuk membantu dan membangun kepercayaan pada *platform online* guna menciptakan ekonomi digital yang aman dan berkelanjutan (The World Bank, 2019).

1.6 Hipotesis

Keberlangsungan ekonomi digital di kawasan ASEAN tidak terlepas dari pengaruh dan tantangan konektivitas (infrastruktur, institusional, dan telekomunikasi) khususnya terhadap akses digital, keterampilan SDM dalam olah data-digital (*digital skill*), beserta kebijakan regional yang mendukung digitalisasi dalam perkembangan sektor ekonomi digital di kawasan ASEAN.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Definisi dan Operasionalisasi Konsep

1.7.1.1 Ekonomi Digital dan Economic “Growth” Development

Ekonom Senior di U.S Oxford Economic, Lydia Boussor mengungkapkan bahwa adanya kegiatan ekonomi digital dan pertumbuhan-pembangunan ekonomi (Economic “growth” Development) *linier* dengan manfaat yang membedakanya

dari kegiatan ekonomi tradisional (Lydia, 2019). Lydia mengungkapkan bahwa ekonomi digital adalah *key driver* dalam melakukan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam lingkup nasional, kawasan maupun global. Tesis Lydia berangkat dari tren transformasi digital dan integrasi sistem yang dihadirkan oleh ekonomi digital dalam menjalankan fungsinya. Fungsi kerja ekonomi digital sendiri salah satunya menghadirkan otomasi ataupun digitalisasi yang mendukung operasi produksi yang lebih cepat, efisien dan menghemat banyak pengeluaran dalam berbagai hal, khususnya kontrol distribusi. Sehingga, tidak dapat dipungkiri bahwa sektor ekonomi digital sangat mudah dalam menggerakkan angka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara umum (Lydia, 2019). Indikator dari berjalanya kegiatan ekonomi digital sendiri dapat dilihat dari adopsi teknologi digital, terbangunnya infrastruktur dan konektivitas digital. Adapun hal lain seperti angka dan tingginya penetrasi internet, penetrasi penggunaan sosial media, konektivitas *mobile sub scriptions* dan ekosistem penggunaan jasa layanan digital juga ikut berpengaruh dalam kegiatan ekonomi ini (Aseanup, 2019).

1.7.1.2 Konektivitas Infrastruktur Digital di Kawasan

Salah satu bentuk pembangunan yang dilakukan upaya mewujudkan konektivitas di kawasan yaitu melalui pembangunan infrastruktur sektor digital atau ICT. Presiden China International Studies, Qu Xing menyebutkan konektivitas infrastruktur digital adalah instrumen yang dapat meningkatkan pembangunan dan terobosan teknologi. Bentuk nyata dari konektivitas infrastruktur digital yakni dari terciptanya konektivitas internet dan komunikasi seluler yang ikut mengubah cara dan moda bisnis bergerak hingga bagaimana orang berinteraksi. Konektivitas infrastruktur digital menurut Mr. Qu Xing juga ikut mendorong tren transformasi digital dalam peningkatan produktivitas dan efisiensi di semua sektor, terutama pada sektor yang ICT telah membuka pintu untuk peningkatan efisiensi perdagangan, layanan keuangan (*financial technology*), layanan informasi dan manajemen data seperti pada layanan transportasi dan logistik (dalam UN ESCAP, 2014). Indikator dari terbentuknya upaya konektivitas infrastruktur digital ini paling sederhana bisa dilihat dari tersedianya infrastruktur ICT, penggunaan sosial

media ataupun penetrasi internet yang tinggi serta terintegrasinya sistem ekonomi (jual, beli, dan bayar), institusi (pemerintahan) dan telekomunikasi.

1.7.1.3 Digital Skills

Transformasi digital menuntut perubahan dan peningkatan kualitas pada SDM, khususnya pada kemampuan teknologi digital. Maka munculah konsep *Digital Skills* yang berangkat dari argumen Franks Webster (2006) tentang kebutuhan produksi pada kebutuhan industri era kini yang lebih membutuhkan mereka tenaga kerja non-manual yang terampil dalam mengelola mengelola data-informasi (*data-information*) dan teknologi dengan sebutan *digital skill*. Dalam *Theories of Information Society*, Webster (2006) menggambarkan munculnya fenomena perubahan dan pergantian dari “pekerja manual” menjadi “pekerja kerah putih” (*white collar*) atau mereka yang terdidik (*educated*) dan semi profesional (*semi-profesional*).

Argumen Webster dipertegas oleh Bank Dunia tentang kebutuhan perimbangan pada SDM untuk mengikuti transformasi digital ke dalam semua sektor pembangunan, khususnya ekonomi. Untuk merealisasikan hal itu, sistem pendidikan, pelatihan ataupun *workshop* menjadi kunci utama yang diperlukan untuk bersaing dalam persaingan era ekonomi digital secara global (The World Bank, 2018). Untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan SDM, kualitas dan kompetensi digital sebagaimana termuat dalam *digital skills* dibutuhkan sebagai indikator yang perlu dilakukan dan dimiliki oleh negara atau suatu kawasan. Sebagai contoh di kawasan ASEAN, untuk mewujudkan *Digital Skills* pada SDM nya dibutuhkan demografi populasi usia dibawah 30 tahun yang besar dan angka melek huruf (literasi) yang tinggi (Menon, 2019). Selain itu, perlu di dorong pula program-program pelatihan kepada pekerja dengan pelatihan olah data digital, kesempatan magang kepada mahasiswa baik jurusan teknologi dan non teknologi, untuk membentuk ekosistem terhadap konsumen serta pengguna layanan digital (World Economic Forum, t.t).

1.7.1.3 Regional Digital Policy (Kebijakan Digital Kawasan)

Menurut Nazir Razak dalam tulisannya yang berjudul ASEAN 4.0: *Making it Work for Future*, bahwa segenap potensi digital dan proses transformasi digital di ASEAN tidaklah berarti apabila tidak dibarengi dengan efektifitas kebijakan lintas batas, kemudahan akses pasar, keamanan dan arus data, modal ventura dan *talent* (SDM). Razak (2018) ingin menunjukkan bahwa kebijakan di kawasan harus pro terhadap transformasi digital seiring dengan kebutuhan yang dituntut oleh revolusi teknologi digital. Peran dari transformasi digital dalam sebuah kawasan dapat memacu pertumbuhan inovasi dan produktivitas di banyak kegiatan, seperti efisiensi pada layanan publik, meningkatkan kesejahteraan melalui kebutuhan informasi, pemerataan ketersediaan pengetahuan, akses pendidikan dan data (OECD, 2017).

Merujuk definisi dari laman bisnis daring, Market Business News (t.t) arti dari kebijakan kawasan juga sebagai keputusan pemerintah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di kawasannya. Antara kebijakan kawasan dan digitalisasi pada era masyarakat informasi ini sangat penting untuk menciptakan harmonisasi dan efektifitas kebijakan yang berkaitan dengan mobilitas lintas batas yang meliputi arus barang, informasi, dan manusia sebagaimana masuk dalam komponen agenda digital (Straitstimes, 2018). Untuk bisa merasakan dampak kebijakan kawasan tentu dibutuhkan berbagai perencanaan, program, ataupun MoU (*Momemandum of Understanding*). Sebagai contoh, untuk merealisasikan ekonomi digital dan terciptanya transformasi digital di Asia Tenggara, dengan adanya organisasi ASEAN dibentuklah perjanjian dan perencanaan seperti ASEAN *Economic Community (AEC) Blueprint 2025*, *Masterplan on ASEAN Connectivity 2025*, dan *The e-ASEAN Framework Agreement* (World Economy Forum, t,t).

1.7.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan peneilitian eksplanatif dengan menjelaskan hubungan kausalitas pada variabel-variabel berdasarkan adanya kerangka untuk menguji hipotesis.

1.7.3 Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini yakni mencakup pengertian dan fenomena globalisasi dan digitalisasi beserta masyarakat informasi. Selain itu, dalam penelitian ini juga mencakup bagaimana tantangan perkembangan digitalisasi ekonomi di ASEAN. Dalam hal ini, penulis membatasi penelitian ini dengan periode waktu dari tahun 2012 hingga 2019 sekaligus peranan dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara terhadap adanya proses keberlangsungan ekonomi digital.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini yaitu kepustakaan, adalah mengumpulkan data-data sekunder dari berbagai macam referensi, yang digali melalui buku, jurnal, artikel-artikel online, surat kabar, dokumen pemerintah, makalah, berita online, hingga pada arsip-arsip serta laporan, baik itu hasil survei dan observasi yang ada sebelumnya beserta referensi lainnya yang membantu.

1.7.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Penggunaan teknik ini merupakan olah analisa data-data berupa informasi dengan bentuk kumpulan kata atau yang memiliki sifat dan karakter sifat kualitatif. Ketersediaan data-data ini nantinya dihubungkan antara satu dengan lainnya untuk menunjukkan sebuah kejelasan setelah melalui proses seleksi, reduksi, penyajian, interpretasi, hingga berlanjut seterusnya.

1.7.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan terbagi dalam lima bab yang diantaranya, pada Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis dan metodologi penelitian. Berlanjut pada bab II, akan diisi dengan fenomena tren transformasi digital dan tantangan yang menghambat keberlangsungan ekonomi digital di Asia Tenggara yakni tentang konektivitas infrastruktur digital serta bagaimana strategi

dari beberapa negara di ASEAN yang menghadapinya. Pada bab III, akan ditunjukkan bagaimana peranan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan *Digital Skills* nya menjadi aspek penting sekaligus tantangan yang dihadapi negara maupun industri di kawasan ASEAN. Pada bab IV akan ditunjukkan mengenai signifikansi kebijakan kawasan (*regional policy*) yang menjadi tantangan bagi hampir semua negara di ASEAN dalam menghadapi tata kelola dan regulasi mobilitas arus barang, informasi dan manusia dalam lintas batas sektor ekonomi digital, dan perannya dalam menyukseskan ekonomi digital. Untuk menutupnya, pada bab V, penulis akan mengisinya dengan kesimpulan penelitian.